

---

## Implementasi Program Kelurahan Tangguh Bencana dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kelurahan Kilasah Kecamatan Kasemen Kota Serang

Lia Rahmayati<sup>\*1</sup>, Ghina Aghniyati<sup>2</sup>, Ghina Aulia<sup>3</sup>

[liarahmayati999@gmail.com](mailto:liarahmayati999@gmail.com)<sup>1</sup>, [ghinaghin105@gmail.com](mailto:ghinaghin105@gmail.com)<sup>2</sup>, [ghinaulia29@gmail.com](mailto:ghinaulia29@gmail.com)<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

**Abstrak** - Bencana banjir menjadi ancaman yang terus berulang di wilayah perkotaan, termasuk di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, yang seluruh kelurahannya masuk dalam kategori rawan banjir. Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah membentuk Program Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) guna memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Program KTB di Kelurahan Kilasah dalam upaya mitigasi bencana banjir. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara *semi-terstruktur* dan observasi lapangan. Analisis data mengacu pada *interactive model* Miles, Huberman, dan Saldana, sementara kerangka analisis implementasi menggunakan teori George C. Edward III yang mencakup empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program secara umum telah berjalan, namun masih menghadapi sejumlah hambatan. Komunikasi antar pelaksana sudah terbentuk, tetapi penyebaran informasi kepada masyarakat belum merata. Sumber daya manusia tersedia namun kapasitas teknis antara anggota masih bervariasi dan anggaran operasional belum tersedia di tingkat kelurahan. Disposisi pelaksana dinilai cukup baik, sedangkan kesadaran preventif masyarakat masih rendah. Struktur birokrasi telah terbentuk secara formal, tetapi mekanisme evaluasi dan pelaporan berkala belum berjalan optimal.

**Kata kunci:** banjir, implementasi kebijakan, kelurahan tangguh bencana, mitigasi bencana

**Abstract** - Flood disasters remain a recurring threat in urban areas, including in Kasemen Subdistrict, Serang City, where all neighborhoods are categorized as flood-prone zones. In response, the government established the Disaster-Resilient Neighborhood Program (KTB) to strengthen community capacity in disaster management. This study aims to examine the implementation of the KTB Program in Kilasah Neighborhood as part of flood mitigation efforts. A qualitative approach was employed, with data collected through semi-structured interviews, and field observation. Data analysis followed the interactive model by Miles, Huberman, and Saldana, while the implementation framework drew on George C. Edward III's theory encompassing four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Findings indicate that program implementation has generally proceeded, yet several obstacles remain. Communication channels among implementers have been established, but information dissemination to the broader community is still uneven. Human resources are available, though technical capacity varies among members and no dedicated operational budget exists at the neighborhood level. Implementers demonstrate a positive disposition, whereas community preventive awareness remains low. The bureaucratic structure has been formally established; however, routine evaluation and reporting mechanisms have yet to function optimally.

**Keywords:** disaster mitigation, disaster-resilient neighborhood program, flood, policy implementation

---

### 1. PENDAHULUAN

Bencana banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Indonesia. Terjadinya bencana banjir dipengaruhi oleh kondisi iklim dan intensitas curah hujan yang tinggi. Dampak bencana banjir antara lain jumlah orang hilang dan meninggal, jumlah orang yang terluka, korban mengungsi, kerusakan pada bangunan sedang, kerusakan pada bangunan ringan, rumah yang terbawa arus, kerusakan pada fasilitas kesehatan, kerusakan pada tempat ibadah, serta kerusakan pada fasilitas pendidikan (Nursidah, 2022). Berdasarkan data bencana alam di Indonesia yang dirilis oleh Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 4.727 kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia, yang 99,26 persen di dominasi oleh bencana hidrometeorologi, sedangkan 0,74 persen lainnya adalah bencana geologi.

**Tabel 1. Jumlah Kejadian Per-Jenis Bencana Nasional Tahun 2025**

Jenis Bencana Alam	Jumlah Kejadian
Gempa Bumi	28
Erupsi Gunung Api	7
Tsunami	1
Banjir	2.009
Karhutla	1.329
Cuaca Ekstream	985
Tanah Longsor	330
Kekeringan	37
Gelombang Pasang & Abrasi	28

*Sumber: Pusdatinkom BNPB, Tahun 2025*

Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi adalah Provinsi Banten, hal ini disebabkan oleh kondisi wilayah yang berada di zona aktif tektonik dan dipengaruhi juga oleh kondisi iklim yang dapat menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam (Azmi et al., 2026). Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), di tahun 2025 Provinsi Banten dikategorikan dalam kelas risiko sedang dengan skor 103,58. Dengan Kota Serang menempati peringkat ke enam wilayah yang memiliki risiko bencana kategori sedang dengan skor 109,52 di Provinsi Banten setelah Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Cilegon.

**Tabel 2. Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Banten**

Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Resiko
Lebak	145,98	Sedang
Serang	138,44	Sedang
Pandeglang	116,82	Sedang
Kota Cilegon	112,94	Sedang
Kota Serang	109,52	Sedang
Tangerang	73,12	Sedang
Kota Tangerang Selatan	68,01	Sedang

*Sumber: BNPB, Tahun 2026*

Persoalan kebencanaan di Kota Serang salah satunya adalah ancaman banjir. Banjir adalah bencana alam yang terjadi di wilayah yang banyak dialiri oleh aliran sungai, atau bisa juga diartikan sebagai kondisi munculnya air ke suatu kawasan luas dan menutupi permukaan bumi kawasan tersebut (Muhammad & Aziz, 2020). Kota Serang yang merupakan wilayah perkotaan sekaligus pusat pemerintahan Provinsi Banten, memiliki karakteristik wilayah yang kompleks, baik dari pertumbuhan pemukiman, aktivitas masyarakat, maupun dari segi tekanan lingkungan. Adapun faktor penyebab terjadinya bencana banjir di wilayah perkotaan merupakan kombinasi berbagai faktor seperti alam dan manusia, kondisi ketika curah hujan tinggi dan pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan sistem perencanaan drainase yang baik (Arvi et al., 2025). Berdasarkan data pemetaan lokasi rawan

bencana di Kota Serang, menunjukkan terdapat sejumlah wilayah yang masuk dalam kategori rawan banjir.

**Tabel 3. Daftar Pemetaan Lokasi Rawan Bencana Banjir di Kota Serang**

<b>Daerah Rawan Bencana Banjir</b>	
<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>
Kasemen	Warung Jaud; Margaluyu; Kasemen; Banten; Kasunyatan; Kilasah; Masjid Priyayi; Bendung; Sawah Luhur; Terumbu.
Serang	Terondol; Kaligandu; Lopang; Unyur; Kota Baru; Cipare Cimuncang.
Cipocok Jaya	Banjar Agung; Penancangan; Cipocok Jaya; Gelam; Banjarsari;
Walantaka	Pargeragung; Kapuren; Kalodran; Pipitan Kiara.
Curug	Cilaku; Sukajaya.
Taktakan	Cilowong.

*Sumber: Dokumen Rencana Kawasan Permukiman, Tahun 2021-2041*

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa persoalan bencana banjir di Kota Serang bukan sekedar peristiwa musiman, tetapi merupakan ancaman yang perlu di perhatikan dalam pembuatan perencanaan pembangunan dan tata kelola kebencanaan daerah. Kecamatan Kasemen merupakan wilayah yang semua Kelurahannya rawan mengalami bencana banjir dan memiliki risiko banjir yang tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Kasemen memiliki urgensi tinggi dalam upaya mitigasi bencana banjir. Mitigasi bencana dapat didefinisikan sebagai upaya mengurangi resiko bencana melalui pembangunan fisik maupun memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan akibat bencana, hal ini dilakukan sebelum terjadinya suatu bencana (Ariadi et al., 2023).

**Tabel 4. Data Jumlah Kejadian Bencana di Kecamatan Kasemen Tahun 2025**

<b>Jenis Bencana</b>	<b>Jumlah Kejadian</b>
Banjir	37
Pohon Tumbang	18
Angin Puting Beliung	0
Rumah Roboh	70
Tersambar Petir	1
Kebakaran	9
Longsor	1
Laka Sungai	1

*Sumber: BPBD Kota Serang, Tahun 2025*

Data pada tabel tersebut menunjukkan total jumlah kejadian bencana yang terjadi di seluruh Kelurahan yang berada pada Kecamatan Kasemen. Dari data tersebut total bencana banjir pada tahun 2025 terjadi sebanyak 37 kali, hal tersebut menunjukkan bencana banjir menempati peringkat kedua

bencana yang sering terjadi setelah bencana rumah roboh. Adapun kerawanan terjadinya bencana banjir di Kecamatan Kasemen dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, kondisi drainase yang belum memadai, kepadatan permukiman penduduk, keberadaan permukiman di sekitar bantaran sungai, serta faktor geografis Kecamatan Kasemen yang berada pada daerah aliran sungai Cibanten sekaligus menjadi Kawasan hilir sungai. Dengan demikian, upaya mitigasi banjir di Kecamatan Kasemen perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat agar resiko bencana dapat dikurangi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat meningkat.

Pemerintah memiliki peran penting dalam upaya mitigasi bencana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan bahwa baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi bencana. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027. Peraturan tersebut melandasi pengembangan program Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Salah satu upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) memberikan perintah untuk memperkuat mitigasi bencana di tingkat kelurahan melalui Program Kelurahan Tangguh Bencana (KTB). Petunjuk teknis terkait program KTB yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Saat ini telah diperbarui berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, yang menjelaskan Kelurahan Tangguh Bencana sebagai suatu kawasan yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi potensi bencana dan dapat mengatur sumber daya masyarakat agar dapat mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas sumber daya untuk meminimalkan resiko bencana.

**Tabel 5. Data Kelurahan Tangguh Bencana di Bentuk di Kecamatan Kasemen**

<b>Kelurahan</b>	<b>Terbentuk</b>	<b>Keterangan</b>
Kasemen	Bulan April Tahun 2018	APBD Provinsi Banten
Margaluyu	Bulan April Tahun 2018	APBD Provinsi Banten
Sawah Luhur	Bulan April Tahun 2018	APBD Kota Serang
Banten	Bulan April Tahun 2018	APBD Kota Serang
Terumbu	Bulan April Tahun 2018	APBD Provinsi Banten
Kasunyatan	Bulan April Tahun 2019	APBD Kota Serang
Bendung	Bulan Februari Tahun 2020	APBD Kota Serang
Mesjid Priyayi	Bulan Februari Tahun 2020	APBD Kota Serang
Kilasah	Bulan Mei Tahun 2022	APBD Kota Serang
Warung Jaud	Bulan Mei Tahun 2022	APBD Kota Serang

*Sumber: BPBD Kota Serang, Tahun 2025*

Program Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) telah terbentuk di seluruh kelurahan di Kecamatan Kasemen. Dalam implementasi program ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertugas membentuk Program tersebut di Desa/Kelurahan yang memiliki risiko tinggi terjadinya bencana. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mitigasi bencana pada wilayah yang memiliki

risiko tinggi terjadi bencana banjir. Setiap Kelurahan Tangguh Bencana di Kecamatan Kasemen memiliki waktu pembentukan dan pelaksanaan program yang berbeda. Dari seluruh Kelurahan Tangguh Bencana di Kecamatan Kasemen tersebut, Kelurahan Kilasah menjadi wilayah yang menarik untuk diteliti karena merupakan salah satu kelurahan yang baru dibentuk Program Kelurahan Tangguh Bencana pada bulan Mei Tahun 2022 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan program yang baru dapat memberikan kesempatan untuk mengamati implementasi program Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) dilaksanakan, sejauh mana kegiatan mitigasi bencana banjir yang telah dilakukan, serta seluruh keterlibatan antar aktor dalam program tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki fokus untuk mengkaji implementasi Program Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) dalam mitigasi bencana banjir di Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Adapun pemilihan lokus penelitian didasarkan pada kondisi Kecamatan Kasemen yang merupakan wilayah dengan tingkat resiko banjir yang tinggi, serta Kelurahan Kilasah sebagai kelurahan baru yang terbentuk Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kecamatan Kasemen. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kilasah dalam upaya mitigasi bencana banjir.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan mengkaji secara mendalam implementasi Program Kelurahan Tangguh Bencana dalam mitigasi bencana banjir di Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Metode penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena sosial berdasarkan perspektif pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program tersebut (Waruwu, 2024). Metode penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan, dinamika pelaksanaan program, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas mitigasi bencana di tingkat lokal. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Kilasah sebagai wilayah yang memiliki kerentanan terhadap bencana banjir sekaligus menjadi lokasi pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana.

Subjek penelitian melibatkan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Informan terdiri atas unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang, pihak Kelurahan Kilasah, serta masyarakat yang terdampak banjir dan memiliki keterlibatan atau pengalaman terkait pelaksanaan program. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, dan observasi lapangan. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam dengan tetap berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangannya secara lebih luas. Observasi lapangan

dilakukan untuk melihat kondisi wilayah dan implementasi program secara langsung. Dalam penelitian kualitatif, peneliti juga memegang peran utama dalam mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data secara sistematis selama proses penelitian berlangsung (Fadli, 2021).

Prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan penentuan lokasi penelitian, penetapan informan, pengumpulan data lapangan, pengolahan data, hingga penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen pendukung. Teknik analisis data mengacu pada *interactive model* yang meliputi tahapan *data collection*, *data condensation*, *data display*, serta *drawing and verifying conclusion* (Miles et al., 2014). Tahapan tersebut dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung sehingga data yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara lebih mendalam dan menghasilkan temuan yang sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan publik. Selain itu kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai sebuah keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak (Dewi, 2022). Dalam penanggulangan bencana pada program KTB, kebijakan publik diperlukan sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengatur upaya pencegahan, kesiapsiagaan, taggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Namun, kebijakan publik bukan hanya sebatas dirumuskan dalam bentuk program, tetapi harus dilaksanakan secara nyata melalui proses implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah memahami kenyataan yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, baik upaya-upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikannya maupun dampak yang ditimbulkan (Kendi, 2024). Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III untuk menganalisis pelaksanaan program KTB di Kelurahan Kilasah. Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dalam (Sawir, 2021) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan seperti bagian dari tindakan legislatif, penerbitan perintah eksekutif, dan penyerahan keputusan peradilan, atau penerbitan suatu regulasi serta dampak dari kebijakan terhadap individu yang terpengaruh.

Implementasi program KTB dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Terbentuknya program Kelurahan Tangguh bencana memiliki peran penting sebagai penyangga bagi kelurahan ketika terjadi bencana (Fandayati & Kurniawan, 2022). Setelah terbentuk program KTB selanjutnya para pelaksana program tersebut akan dibekali dengan sosialisasi dan pelatihan dalam menghadapi bencana baik saat pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana. Program ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPBD Kota Serang Nomor 013/BPBD/VI/2022 tentang Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana di Wilayah Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Dalam pelaksanaannya keberhasilan Program Kelurahan

Tangguh Bencana (KTB) sangat bergantung pada pelaksanaan kelembagaan, koordinasi, dan keterlibatan antar masyarakat sebagai pelaksana utama dalam menjalankan program kebencanaan (Romadhan et al., 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana program KTB di Kelurahan Kilasah, kegiatan mitigasi banjir yang telah dilakukan meliputi sosialisasi tentang kebencanaan kepada masyarakat, dan kegiatan gotong royong lingkungan yang dilaksanakan sekitar satu hingga dua kali dalam satu bulan secara rutin. Kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi hambatan aliran air yang dapat menyebabkan banjir.

**Tabel 6. Data Kejadian Bencana di Kelurahan Kilasah Tahun 2022-2025**

<b>Tahun</b>	<b>Banjir</b>	<b>Pohon Tumbang</b>	<b>Rumah Roboh</b>	<b>Rumah Tersambar Petir</b>	<b>Kekeringan (Krisis Air Bersih)</b>
2022	-	3	18	-	-
2023	1	-	13	1	14
2024	-	1	16	-	-
2025	-	3	16	-	-

*Sumber: BPBD Kota Serang (diolah penulis, 2026)*

Data kejadian bencana di Kelurahan Kilasah tersebut menunjukkan wilayah ini tidak hanya ancaman bencana banjir, tetapi juga beberapa kejadian bencana seperti pohon tumbang, rumah roboh, rumah tersambar petir, dan kekeringan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan KTB di Kelurahan Kilasah menjadi penting karena wilayah tersebut memiliki risiko bencana yang beragam. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dilapangan untuk mengetahui sejauh mana implementasi program KTB di Kelurahan Kilasah, dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C Edward III. Dalam model implementasi kebijakan Edward III terdapat empat variabel yang menjadi penentu keberhasilan atau hambatan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Agustino, 2026). Oleh karena itu, pembahasan yang dapat peneliti paparkan berdasarkan keempat dimensi tersebut adalah, sebagai berikut:

#### **a. Komunikasi**

Komunikasi menurut George C Edward III merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena kebijakan yang disampaikan harus dilakukan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh pelaksana maupun kelompok sasaran. Keberhasilan pada pelaksanaan Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) bergantung pada aspek komunikasi agar informasi tentang mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan penanggulangan bencana dapat di terima dengan jelas oleh pelaksana dan kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Kilasah, komunikasi pelaksanaan program ini dilakukan melalui jalur formal dan informal. Komunikasi formal dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pelatihan, dan simulasi kebencanaan yang diberikan kepada pelaksana program KTB. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPBD Kota Serang, kegiatan sosialisasi dan pelatihan kebencanaan lebih diprioritaskan bagi para anggota forum KTB sebagai pelaksana program di tingkat

kelurahan. Selain itu, komunikasi informal dilakukan melalui grup WhatsApp yang digunakan untuk koordinasi, penyampaian informasi, serta informasi kegiatan secara lebih cepat dan fleksibel.

Hasil wawancara dengan pihak BPBD Kota Serang, menunjukkan bahwa koordinasi informasi darurat ketika terdapat risiko bencana dilakukan melalui grup WhatsApp kelurahan agar dapat disampaikan kepada pelaksana Kelurahan Tangguh Bencana dan masyarakat. Koordinasi tersebut dilakukan agar informasi tentang kebencanaan dapat segera ditindaklanjuti untuk mengurangi resiko bencana di wilayah Kelurahan Kilasah. Selain itu, hasil wawancara dengan Koordinator Bidang Pencegahan dan Mitigasi KTB di Kelurahan Kilasah menunjukkan bahwa arahan dan sosialisasi yang diterima dari pihak BPBD Kota Serang kemudian disampaikan kepada ketua RT/RW agar informasi dapat diteruskan kepada masyarakat.

Aspek komunikasi pada program KTB di Kelurahan Kilasah sudah memiliki alur komunikasi yang jelas, namun belum sepenuhnya optimal. Penyampaian informasi lebih banyak terserap pada tingkat pelaksana, sementara masyarakat belum sepenuhnya memahami program KTB secara utuh. Sehingga, keterlibatan masyarakat masih terbatas dan informasi yang diterima tentang program tersebut belum secara utuh. Menurut pandangan George C Edward III, ketidaksamarataan dalam aspek komunikasi disebabkan oleh batasan dalam proses sosialisasi dan belum maksimalnya peran para pelaksana dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat (Azmi et al., 2026). Hal tersebut terjadi karena kegiatan sosialisasi dan pelatihan lebih terfokus pada anggota pelaksana Program Kelurahan Tangguh Bencana (KTB). Dengan demikian, komunikasi dalam implementasi program KTB di Kelurahan Kilasah sudah berjalan secara struktural, namun masih perlu diperkuat melalui sosialisasi yang lebih luas dan berkelanjutan kepada masyarakat.

#### **b. Sumber Daya**

Sumber daya dalam teori George C Edward III merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena pelaksanaan program tidak dapat berjalan hanya dengan aturan yang ada. Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan kewenangan. Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Kilasah, sumber daya manusia telah tersedia melalui pembentukan struktur organisasi pelaksana. Pada aspek sumber daya manusia program KTB di Kelurahan Kilasah memiliki total anggota sebanyak 35 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, koordinator tiap bidang, dan anggota. Dalam pelaksanaannya, KTB di Kelurahan Kiasah dibagi ke dalam tiga bidang yaitu, bidang pencegahan dan mitigasi, bidang kesiapsiagaan, serta bidang hubungan luar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya bertumpu pada satu aktor, melainkan telah dibagi berdasarkan fungsi kerja masing-masing.

Dari aspek kapasitas pelaksana, anggota KTB telah mendapatkan pelatihan dari pihak BPBD Kota Serang. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana program di Kelurahan Kilasah menunjukkan tingkat pemahaman dan kemampuan teknis tiap anggota masih berbeda-beda sehingga penyebaran informasi masih belum merata. Hal tersebut terjadi bukan hanya karena kemampuan individu

dalam menerima informasi yang berbeda-beda, melainkan juga dipengaruhi oleh keterbatasan terhadap akses informasi program di tingkat kelurahan. Materi dan dokumen lengkap terakait pelaksanaan program lebih banyak ada di fasilitator daerah yakni BPBD Kota Serang, sedangkan di tingkat Kelurahan hanya sebagian kecil. Sementara itu dari aspek anggaran, pelaksana program KTB di Kelurahan Kilasah menyatakan belum ada anggaran khusus di tingkat kelurahan untuk mendukung kegiatan KTB. Selain itu dari aspek fasilitas, hasil wawancara dengan koordinator bidang pencegahan dan mitigasi bencana KTB, dalam menjalankan program tersebut mendapatkan dukungan fasilitas dasar seperti seragam, jas hujan, sepatu *boots*, alat kebersihan dan jika membutuhkan alat kebencanaan lain dapat mengajukan peminjaman kepada BPBD Kota Serang. Hal tersebut menunjukkan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana belum tersedia secara memadai.

Dengan demikian, sumber daya dalam implementasi program Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) di Kelurahan Kilasah sudah tersedia secara kelembagaan dan fasilitas dasar. Namun dalam sumber daya operasional belum memadai, terutama dalam sisi anggaran khusus yang tidak tersedia. Sumber daya yang terbatas dapat menghambat implementasi karena pelaksanaan program membutuhkan dukungan operasional untuk dapat menjalankan kebijakan secara berkelanjutan (Subekti et al., 2017). Dengan demikian, kondisi tersebut menunjukkan dalam aspek sumber daya masih terdapat kendala dalam penyediaan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan program.

### **c. Disposisi**

Dalam teori George Edward III, disposisi berikatan dengan sikap, komitmen, kemauan, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap suatu kebijakan yang dijalankan. Kebijakan yang telah dirancang dengan baik tetap berpotensi mengalami hambatan apabila pelaksana tidak memiliki komitmen yang kuat ataupun kelompok sasaran tidak memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program secara aktif. Program KTB di Kelurahan Kilasah resmi dibentuk pada tahun 2022 sebagai bentuk komitmen pemerintah kelurahan dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana KTB Kelurahan Kilasah, anggota KTB memiliki tanggung jawab utama menjaga kondusivitas wilayah serta menjadi pihak pertama yang turun ke lapangan ketika terjadi bencana. Apabila terjadi banjir atau masyarakat membutuhkan bantuan darurat, anggota KTB melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi warga serta memberikan penanganan awal sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. Sikap kesiapsiagaan tersebut juga telah diatur dalam prosedur penanganan bencana yang berlaku, dimana anggota KTB melakukan peninjauan lapangan, melaporkan kondisi kepada lurah, kemudian diteruskan kepada pihak kecamatan dan BPBD apabila diperlukan penanganan lebih lanjut. Sikap tersebut menunjukkan adanya rasa tanggung jawab sosial dan

kepedulian yang tinggi terhadap keselamatan masyarakat di wilayah rawan bencana. Dengan demikian, disposisi pelaksana KTB Kelurahan Kilasah dapat dikatakan telah mendukung implementasi program mitigasi bencana karena terdapat komitmen nyata dalam menjalankan fungsi kebencanaan di tingkat lokal.

Komitmen tersebut juga didukung oleh sistem komunikasi yang terstruktur antara pelaksana KTB dan pihak BPBD. Disposisi positif juga tercermin dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi dan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat. Informasi, arahan teknis, dan materi mitigasi diperoleh langsung dari BPBD melalui berbagai pelatihan yang diikuti oleh anggota KTB serta difasilitasi melalui grup komunikasi khusus. Setelah menerima pelatihan, anggota KTB menyampaikan kembali materi tersebut kepada para ketua RT dan RW melalui rapat koordinasi yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Selanjutnya, ketua RT dan RW bertugas meneruskan informasi kepada masyarakat, termasuk mengenai tata cara evakuasi mandiri dan langkah langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Pola komunikasi yang berjenjang tersebut menunjukkan adanya keseriusan pelaksana dalam memastikan informasi mitigasi dapat menjangkau masyarakat secara luas.

Responsivitas pelaksana juga terluhat dari pandangan masyarakat yang merasa terbantu dengan keberadaan KTB ketika terjadi bencana banjir di lingkungan mereka. Pelaksana program tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga terlibat langsung dalam proses evakuasi, pemantauan kondisi lapangan, serta penyampaian informasi kepada warga terdampak. Selain itu, anggota KTB menunjukkan kondisi siap sedia karena bersedia turun ke lapangan kapan pun dibutuhkan tanpa terikat jam kerja tertentu. Sikap siap sedia tersebut mencerminkan adanya loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas kemanusiaan yang mereka jalankan di tengah masyarakat. Keberadaan KTB juga memberikan rasa aman bagi masyarakat karena masyarakat mengetahui bahwa terdapat kelompok siap sedia yang dapat membantu ketika situasi darurat terjadi.

Selain kondisi siap sedia saat bencana, komitmen pelaksana juga terlihat melalui kegiatan mitigasi yang dilakukan secara rutin bersama masyarakat, dalam upaya mitigasi banjir KTB di Kelurahan Kilasah mengajak warga melaksanakan kegiatan gotong royong satu hingga dua kali dalam sebulan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi potensi risiko banjir. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan untuk meminimalkan dampak bencana di wilayah Kelurahan Kilasah. Lalu, kapasitas anggota KTB juga terus ditingkatkan melalui pelatihan lanjutan dan evaluasi yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana tidak hanya tercermin dalam

tindakan saat terjadi bencanam, tetapi juga dalam upaya pencegahan dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, disposisi positif dari pelaksana belum sepenuhnya diikuti oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran program mitigasi bencana. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPBD Kota Serang, sebagian masyarakat masih memiliki kesadaran preventif yang rendah terhadap risiko bencana banjir yang terjadi di wilayah tersebut. Masyarakat cenderung baru melakukan evakuasi ketika kondisi banjir sudah cukup parah dan air telah memasuki rumah warga sehingga proses evakuasi menjadi lebih sulit dilakukan. Selain itu, pelaksana KTB juga menyampaikan bahwa sebagian warga masih sulit menerima arahan mitigasi sebelum mereka mengalami dampak bencana secara langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran bersama mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana belum terbentuk secara optimal di lingkungan masyarakat.

Hambatan lain yang dihadapi dalam implementasi program adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebencanaan. Sebagian warga masih mengharapkan adanya insentif ketika dilibatkan sebagai relawan dalam kegiatan mitigasi maupun penanggulangan bencana. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam program KTB lebih banyak hanya pada tahap penerimaan informasi dan sosialisasi, sementara keterlibatan dalam kegiatan teknis masih didominasi oleh anggota KTB. Di sisi lain, KTB juga menghadapi keterbatasan anggaran operasional karena tidak terdapat alokasi dana khusus dari kelurahan untuk mendukung pelaksanaan program. Kondisi tersebut menjadi tantangan, terutama ketika diperlukan kegiatan sosialisasi atau pengumpulan masyarakat dalam jumlah besar untuk edukasi kebencanaan.

Rendahnya kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa tantangan disposisi tidak hanya pada pelaksana kebijakan, tetapi juga pada masyarakat sebagai kelompok sasaran program mitigasi. Program mitigasi pada dasarnya memerlukan perubahan perilaku masyarakat agar tidak hanya bersikap reaktif ketika bencana datang, tetapi juga memiliki kesadaran preventif dalam upaya pengurangan risiko bencana. Keberhasilan implementasi program KTB tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pelaksana, tetapi juga oleh tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kegiatan mitigasi bencana. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan agar pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana dapat meningkat secara merata.

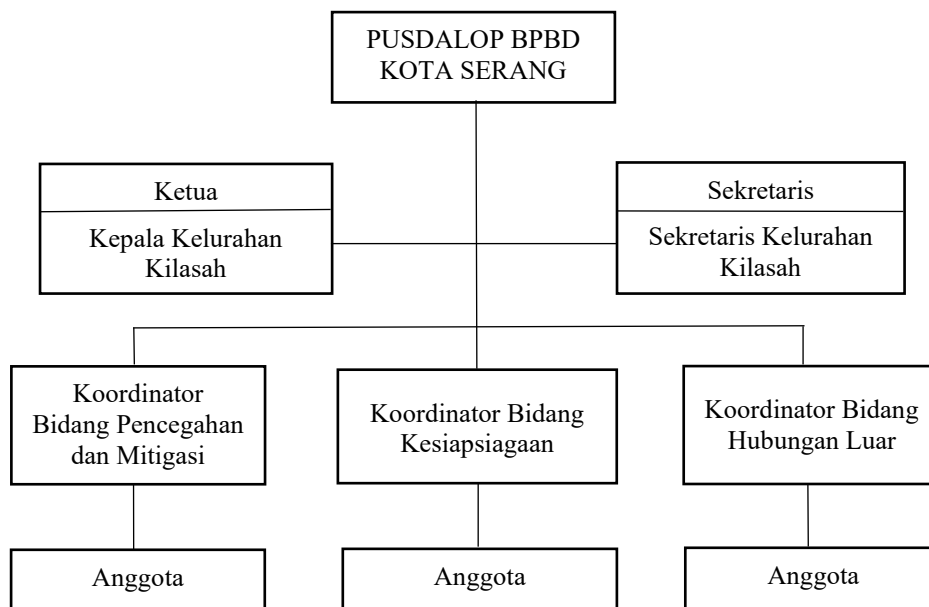
Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian oleh (Umeidini et al., 2019) yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh tingkat kepedulian warga terhadap risiko yang mereka alami di lingkungan tempat tinggalnya. Semakin

tinggi kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana, maka semakin besar pula kemungkinan masyarakat terlibat dalam kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Sebaliknya, rendahnya kepedulian masyarakat terhadap risiko bencana dapat menyebabkan masyarakat masih menunjukkan pola perilaku reaktif terhadap bencana banjir. Oleh karena itu, disposisi pelaksana KTB Kelurahan Kilasah dapat dikatakan cukup baik karena didukung oleh komitmen, responsivitas, serta kesiapan pelaksana dalam membantu masyarakat. Akan tetapi, disposisi masyarakat masih menjadi hambatan utama karena kesadaran preventif dan partisipasi aktif dalam mendukung bencana belum terbentuk secara merata di seluruh lingkungan masyarakat.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam teori Edward III berkaitan dengan bagaimana tugas dan wewenang dibagi antar pelaksana, bagaimana mekanisme kerja diatur, serta sejauh mana standar operasional prosedur (SOP) dan alur koordinasi berfungsi dalam praktik. Struktur yang jelas dan tertata menjadi syarat penting agar pelaksanaan kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri dan setiap aktor memahami perannya masing-masing. Edward III juga menekankan bahwa fragmentasi dalam struktur birokrasi dapat menghambat implementasi kebijakan secara keseluruhan, terutama apabila mekanisme koordinasi antarunit tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut menjadikan keberadaan standar operasional prosedur yang jelas dan konsisten sebagai salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi suatu kebijakan.

**Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kilasah**



Sumber: BPBD Kota Serang, Tahun 2022

Berdasarkan gambar tersebut, Program KTB Kilasah telah memiliki struktur organisasi yang terbentuk secara formal sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Posisi Ketua dijabat oleh Kepala Kelurahan Kilasah, sehingga jabatan tersebut secara

otomatis dipegang oleh lurah yang sedang menjabat. Mekanisme ini menjaga kesinambungan kepemimpinan program meskipun terjadi pergantian pejabat. Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Kelurahan Kilasah dengan tugas menjaga kelancaran administrasi dan dokumentasi program. Di bawahnya terdapat tiga koordinator bidang yang masing-masing membawahi anggota, yaitu Koordinator Bidang Pencegahan dan Mitigasi, Koordinator Bidang Kesiapsiagaan, dan Koordinator Bidang Hubungan Luar. Pembagian bidang ini mencerminkan bahwa program KTB tidak hanya berorientasi pada respons saat bencana terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan pengelolaan hubungan dengan pihak eksternal. Secara struktural, program ini juga berada di bawah koordinasi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOP) BPBD Kota Serang, yang menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara pelaksana tingkat kelurahan dengan otoritas kebencanaan daerah.

Dari sisi pelaksanaan lapangan, KTB Kilasah sudah memiliki alur penanganan yang terstruktur ketika bencana terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Bidang Pencegahan dan Mitigasi KTB Kelurahan Kilasah, anggota KTB akan turun langsung ke lokasi sebagai pihak pertama yang melakukan peninjauan dan penanggulangan awal. Setelah itu kondisi dilaporkan kepada Lurah, kemudian diteruskan ke pihak Kecamatan, dan apabila dibutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan disampaikan ke BPBD Kota Serang. Alur berjenjang ini menunjukkan bahwa koordinasi antarlevel sudah berjalan dalam kondisi darurat. Namun demikian, struktur birokrasi KTB Kilasah masih menyisakan kelemahan pada aspek pelaporan dan evaluasi rutin. Pihak BPBD Kota Serang menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat sistem penilaian berkala maupun kewajiban pelaporan rutin dari kelurahan mengenai perkembangan KTB di lapangan. Hal senada juga disampaikan oleh pelaksana KTB Kilasah, di mana pelaporan lebih bersifat insidental, hanya dilakukan ketika benar-benar terjadi peristiwa bencana. Artinya, di luar situasi darurat, tidak ada mekanisme pemantauan yang berjalan secara konsisten untuk menilai dinamika program dari waktu ke waktu.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Romadhan et al., 2022), bahwa implementasi Kelurahan Tangguh Bencana menekankan koordinasi kelembagaan dalam penanganan kebencanaan tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan dan bimbingan dari berbagai pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Artinya, struktur yang sudah terbentuk secara formal perlu terus didukung oleh mekanisme pemantauan dan evaluasi yang aktif agar efektivitasnya tidak hanya terlihat saat bencana, tetapi juga dalam proses pencegahan dan kesiapsiagaan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi KTB Kilasah sudah terbentuk dengan cukup baik dan memiliki alur koordinasi yang jelas dalam kondisi darurat, namun belum sepenuhnya diperkuat oleh mekanisme evaluasi dan pelaporan berkala yang dapat menjaga konsistensi pelaksanaan program.

#### **4. KESIMPULAN**

Pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) di Kelurahan Kilasah, terutama dalam mitigasi bencana banjir belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan program masih mengalami beberapa

faktor yang menghambat pelaksanaannya. Pada aspek komunikasi alur penyampaian informasi anatar aktor pelaksana program KTB sudah terbentuk baik secara formal maupun informal. Namun, penyebaran informasi kepada masyarakat belum sepenuhnya optimal karena kegiatan sosialisasi masih lebih terfokus kepada anggota pelaksana KTB sehingga pemahaman masyarakat mengenai program KTB belum merata. Selain itu pada aspek sumber daya program KTB Kelurahan Kilasah telah memiliki struktur kelembagaan, sumber daya manusia, serta fasilitas dasar untuk mendukung kegiatan program. Tetapi masih terdapat hambatan berupa keterbatasan anggaran operasional yang tidak tersedia di tingkat kelurahan sehingga pelaksanaan program belum berkelanjutan secara optimal. Selain itu berdasarkan hasil penelitian kemampuan teknis dan pamahan antar anggota pelaksana juga masih berbeda-beda. Hal tersebut memengaruhi efektivitas penyebaran informasi dan pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana di Kelurahan Kilasah.

Dalam aspek disposisi dari pelaksana KTB menunjukkan sikap responsif, komitmen sosial, dan kondisi siap sedia yang cukup baik dalam membantu masyarakat ketika terjadi bencana. Sedangkan kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana masih tergolong rendah karena sebagian masyarakat cenderung bersikap reaktif dan baru melakukan tindakan ketika bencana telah terjadi. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi dan kesiapan juga menjadi tantangan dalam mendukung keberhasilan implementasi program KTB. Sementara itu dari aspek struktur birokrasi, program KTB Kelurahan Kilasah telah memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas serta didukung oleh mekanisme koordinasi berjenjang anatar kelurahan, kecamatan, dan BPBD Kota Serang ketika terjadi kondisi darurat. Tetapi dalam pelaksanaan program masih memiliki kelemahan pada aspek monitoring dan evaluasi, karena pelaporan kegiatan lebih bersifat insidental saat terjadi bencana saja. Oleh karena itu, sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan program KTB perlu dilakukan penguatan koordinasi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, dukungan sumber daya yang memadai, serta evaluasi program secara berkelanjutan agar implementasi Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kilasah dapat berjalan lebih optimal terutama dalam mendukung mitigasi bencana banjir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2026). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (M. Sylviana, Ed.; 3rd ed.). Alfabeta.
- Ariadi, H., Maryam, Sari, N. A. P., Rahmah, A., Fikri, M., & Raudah, S. P. (2023). *Mitigasi Bencana* (A. F. Pratama & A. R. Pratama, Eds.; 1st ed.). PT. Arr Rad Pratama.
- Arvi, M. D., Sibarani, R. S. Y., Tanjung, Y. I., & Fairuz, T. (2025). Analisis Faktor Penyebab Bencana Banjir di Kota-Kota Besar Indonesia: Studi Kasus Analisis Banjir Berbasis Literasi. *Indonesian Journal of Emerging Trends in Community Empowerment*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.71383/ijetce.v3i1.70>
- Azmi, A. N., Amiruddin Suwaib, & Maisaroh, I. (2026). Implementasi Program Desa Tangguh Bencana (Dstana) dalam Upaya Mitigasi Bencana di Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Tahun 2023-2024. *Journal of Citizenship*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37950/joc.v5i1.637>

- Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi* (J. Harsono, Ed.; 1st ed.). Penerbit Samudra Biru.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fandayati, I., & Kurniawan, F. A. (2022). Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojokerto Kota Kediri. *Indonesian Journal of Environment and Disaster (IJED)*, 1(2), 55–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/ijed.v1i2.299>
- Kendi, I. K. (2024). *Implementasi Kebijakan Publik* (Y. A. Achmad, Ed.). Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methodes Sourcebook* (H. Salmon, Ed.; 3rd ed.). SAGE Publications.
- Muhammad, F. I., & Aziz, Y. M. A. (2020). Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Dayeuhkolot. *Jurnal Ilmu Administrasi Kebijakan*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2235>
- Nursidah, D. R. (2022). Pengelompokan Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indikator Dampak Bencana Banjir Tahun 2017=2020 Menggunakan K-Medoids. *BIMASTER: Buletin Ilmiah Matematika, Statistika Dan Terapannya*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.26418/bimst.v11i02.53781>
- Romadhan, Ach. A., Rahman, T., Sihidi, I. T., & Hadi, K. (2022). Implementasi Kelurahan Tangguh Bencana di Bandungrejosari Kota Mlang. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2).
- Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik* (1st ed.). CV. Budi Utama.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Tambak . *The Indonesian Journal Of Public Administration*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.923>
- Umeidini, F., Nuriah, E., & Fedryansyah, M. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23115>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/afeksi.v5i2.236>